

ABSTRAK

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan instrumen hukum strategis dalam memastikan komitmen nasional terhadap agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Namun, dalam praktiknya, ketidakpatuhan sejumlah pemerintah daerah terhadap regulasi ini menimbulkan persoalan yuridis yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum dari ketidakpatuhan tersebut, termasuk konsekuensi normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta studi kasus implementasi di beberapa daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap Perpres 111 Tahun 2022 dapat menghambat sinkronisasi kebijakan pusat-daerah dan menimbulkan pelanggaran terhadap asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Selain itu, ketidakpatuhan tersebut dapat membuka ruang bagi sanksi administratif hingga potensi intervensi pemerintah pusat. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan dan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah menjadi krusial dalam menjamin efektivitas pelaksanaan Perpres ini secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ketidakpatuhan, Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden, Sustainable Development Goals, Implikasi Yuridis

ABSTRACT

Presidential Regulation Number 111 of 2022 concerning the Implementation of Sustainable Development Goals is a strategic legal instrument for ensuring national commitment to the Sustainable Development Goals agenda. However, in practice, non-compliance by a number of regional governments with this regulation has created significant legal issues. This study aims to examine the legal implications of this non-compliance, including normative consequences. The research method used is a normative-juridical approach, analyzing laws and regulations, official documents, and case studies of implementation in several regions. The results indicate that non-compliance by regional governments with Presidential Regulation 111 of 2022 can hinder the synchronization of central-regional policies and lead to violations of the principles of good governance. Furthermore, such non-compliance can open the door to administrative sanctions and potential intervention by the central government. Therefore, strengthening oversight mechanisms and increasing the capacity of regional institutions are crucial to ensuring the comprehensive and sustainable implementation of this Presidential Regulation.

Keywords: *Non-compliance, Regional Government, Presidential Regulation, Sustainable Development Goals, Legal Implications*